

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005–2025

Secara nasional, Indonesia telah menetapkan visi pembangunannya yakni **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR;** sedangkan visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah **NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL.**

Secara etimologis, visi berasal dari kata Latin yakni *videre*, yang berarti melihat, memandang. Berdasarkan pengertian etimologis ini, para pakar mencoba mendefinisikan visi, antara lain: suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan (*a compelling conceptual image of desired future*). Tampak dalam uraian ini bahwa visi harus melukiskan suatu maksud dan tujuan terluas dan terumum, menggambarkan aspirasi atau hasrat masa depan (*desired future*) untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang terbaik bagi konsumen/pelanggan/masyarakat, menekankan pada pencapaian hasil yang bermakna pada dampak dan keuntungan (*impact and benefit*) dalam kurun atau periode waktu dan ruang tertentu. Selain itu, penentuan dan penetapan visi harus mempertimbangkan perkembangan aktual yang sudah dicapai pada masa lalu maupun kini yang mempengaruhi masa depan, baik berupa tantangan maupun ancaman dan berlandaskan pada potensi dan karakter yang dimiliki (faktor manusia, sumber daya alam, uang, wilayah, dsb.) dalam ruang dan waktu tertentu yang bisa diberdayakan secara efektif, efisien, sinergis dan akuntabel.

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara lebih khusus dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu dalam penentuan dan penetapan visi pembangunannya tetap berpedoman pada visi pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 serta tetap memperhitungkan potensi dan karakter yang dimilikinya (*dassein*). Berlandaskan pada visi pembangunan nasional, visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (dibaca: orang-orang yang tinggal di Manggarai dan orang-orang Manggarai yang berdomisili di luar wilayah Manggarai) untuk

mengelola dan mensolusi persoalan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 ialah :

MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai di atas merupakan satu kesatuan dan bagian integral sebagai jabaran secara berjenjang dari Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional. Karena itu secara bertingkat ke bawah, harus melakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabarkannya dalam bentuk RPJMD dan RKPD, SKPD dalam bentuk Renstra, Kepala Desa dalam bentuk RPJMDes. Hanya dengan cara tersebut dapat ditentukan indikator konkrit dan terukur keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan yang dicapai dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tersebut.

Kemakmuran (*welfare*), kesejahteraan (*prosperity*), keadilan (*justice*) dan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan mimpi setiap manusia sebagai *homo faber*, manusia pekerja, subjek pembangunan; menjadi indikator kualitas karakter dan persona manusia yang bermartabat dalam sebuah konsep dan pelaksanaan pembangunan. Dalam konsep ini, tampak manusia menjadi *ens multidimensi*. Karena manusia merupakan *ens multidimensi*, maka keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEK dan pertahanan keamanan, juga mencakupi dan berujung pada rasa keadilan dalam interaksi sosial dan interelasi horizontal bagi

semua lapisan sosial, kelompok dan anggota masyarakat. Bila setiap individu manusia dalam suatu masyarakat mengalami kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan berkelanjutan maka di sanalah manusia mengalami kebahagiaan.

Salah satu tugas negara dalam pembangunan ialah mendukung dan melengkapi upaya masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang makmur, sejahtera, adil dan berkelanjutan. Secara umum, kesejahteraan, kemajuan, keadilan merupakan suatu kondisi ideal batiniah dan jasmaniah yang dialami dan dirasakan oleh setiap manusia yang berharkat dan bermartabat dalam suatu masyarakat akan suatu suasana bahagia, bebas, makmur, aman dan sebagainya baik dalam interaksi dan interelasi horizontal maupun vertikal. Dalam kondisi yang demikian setiap individu manusia dalam suatu masyarakat menemukan jati dirinya sebagai persona yang berharkat dan bermartabat.

Makmur. Secara etimologis, makmur berarti banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera (tentang negeri, daerah, dsb.); serba cukup (mewah, tidak kekurangan). Kemakmuran berarti suatu kondisi fisiologis akan terpenuhinya aneka kebutuhan jasmaniah hidup manusia, sehingga dapat mengaktualisasikan citranya sebagai persona yang berharkat dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan, tampak bahwa kemakmuran mengandung suatu makna biologis atau makna fisiologis. Itu berarti kemakmuran masyarakat secara nyata dalam pembangunan bidang ekonomi dan bidang infrastruktur sarana dan prasarana.

Dalam konteks di atas, indikator kemakmuran masyarakat tampak antara lain pada: tingkat pendapatan per kapita, distribusi/kesenjangan pendapatan dalam masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi/kenaikan harga-harga, pembangunan kawasan lingkungan hidup dan penataan ruang. Tingginya pendapatan rata-rata, rendahnya kesenjangan pendapatan, rendahnya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pengangguran, tingkat inflasi yang moderat dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbasis tata ruang merupakan pedoman umum bahwa masyarakat telah mengalami kemakmuran. Dalam konteks masyarakat Manggarai yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatannya, kemakmuran masyarakat dapat dicapai jika proses pembangunan dilakukan atas dasar keterpaduan antar sektor, yakni antara sektor primer, sekunder dan tersier; serta pemanfaatan sumber alam di ruang daratan dan ruang lautan dengan tetap berlandaskan pada asas rasionalitas, efisiensi, dan

berwawasan lingkungan. Karena itu, variabel yang sering digunakan untuk mengukur kemakmuran masyarakat, antara lain ialah: pertumbuhan PDRB, struktur PDRB, PDRB dan Pendapatan per kapita, tingkat kesenjangan pendapatan dalam masyarakat, kesempatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, distribusi tenaga kerja pada setiap sektor, jumlah penduduk miskin, investasi dan aktivitas ekspor-impor, peningkatan peran UKM, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, persentase luas lahan bersertifikat, ketaatan terhadap RT/RW, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat pemanfaatan sumber daya alam, cakupan sistem pengelolaan sampah, tingkat rehabilitasi sumber daya alam, ketersediaan *early warning system*, luas lahan kritis, ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dan tata ruang wilayah, dan sebagainya. Dengan kata lain, kemakmuran masyarakat harus memperhatikan aspek-aspek antara lain: pertumbuhan (pendapatan, investasi dan kesempatan kerja), pemerataan (distribusi pendapatan dan pemerataan akses modal), kesinambungan (daya dukung lingkungan, tata ruang dan manusia berkeahlian) dan pemberdayaan (masyarakat lokal dan golongan ekonomi lemah).

Sejahtera. Secara etimologis, sejahtera berarti aman sentosa dan makmur; kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman). Dalam konteks kehidupan bernegara, kesejahteraan merupakan keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah setiap individu dalam suatu kehidupan bersama (masyarakat) mengembangkan semua nilai untuk mencapai keutuhan personal yang berharkat dan bermartabat. Tampak di sini, bahwa kesejahteraan tidak identik dengan jumlah/takaran kesejahteraan semua individu atau anggota masyarakat.

Mengalami atau merasakan sejahtera (lebih bernuansa batiniah/mental) mengandaikan adanya takaran atau indikator yang digunakan. Karena itu mengukur kesejahteraan untuk kumpulan persona dalam suatu ada bersama (komunitas masyarakat) berarti mengukur penjumlahan perasaan obyektif dan subyektif dari setiap persona dalam suatu ada bersama pada saat tertentu atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Itu berarti dibutuhkan "nilai" dari besaran-besaran yang dapat diukur (dikuantifikasi), agar

dapat dilihat apakah ada perubahan kesejahteraan antara kurun waktu yang lalu, sekarang dan masa datang. Kesejahteraan bersama model inilah yang menjadi spirit RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025.

Indikator kesejahteraan dalam pencapaian hasil pembangunan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum indikator kesejahteraan didasarkan pada beberapa aspek, seperti:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Problem kualitas SDM merupakan perkara aktual dan pelik yang sekian sering digunjang-ganjing oleh *ens rationalis*, karena masalah kualitas SDM sangat ditentukan oleh keharmonisan antara aspek kognitif, afektif, volutif dan religiositas. SDM yang berkualitas mencakupi dimensi manusiawi, rohani, intelektual dan pelayanan. Implementasi konkrit dari kualitas SDM tampak dalam tingkat ketergantungan (ratio ketergantungan) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) yaitu indeks gabungan yang ditentukan berdasarkan rata-rata usia harapan hidup, angka melek huruf dan pendapatan per kapita.
- 2) Kesehatan. Kualitas kesehatan setiap persona dalam suatu masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan. Kualitas kesehatan tampak pada variabel-variabel seperti:
 - a) *Proportion of births attended by skilled health personnel* yakni proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang profesional;
 - b) Mortalitas. Dalam variabel mortalitas, aspek yang dilihat antara lain: Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, Angka Harapan Hidup Waktu Lahir dan sebagainya.
 - c) Morbiditas. Dalam variabel morbiditas, hal-hal yang diperhatikan antara lain: Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk, Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+, Prevalensi HIV/AIDS, Angka "Accute Flacid Paralysis (AFP)" pada anak < 15 thn per 100.000 anak, Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk.
 - d) Status Gizi. Dalam variable ini, hal-hal yang sering menjadi perhatian antara lain: Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentasi Kecamatan Bebas Rawan Gizi.
- 3) Demografi dan Keluarga Berencana. Kesejahteraan dari aspek demografi diukur oleh pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran (laju

pertumbuhan penduduk/LPP dan *total fertility rate/TFR*), kematian (*mortality*) dan migrasi (*migration*). Masyarakat yang sudah sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, TFR yang kecil atau bahkan zero dan angka harapan hidup yang lebih tinggi.

- 4) Kemiskinan. Kesejahteraan mengandaikan adanya kemakmuran secara adil dan merata bagi semua orang. Karena itu, indikator kesejahteraan dari aspek kemiskinan antara lain: persentasi jumlah penduduk di atas garis kemiskinan yang menikmati fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, air minum bersih dan sebagainya.
- 5) Pendidikan merupakan Investasi Modal Manusia. Kesejahteraan dari aspek pendidikan ditandai bila semua orang (lelaki dan perempuan, orang miskin dan kaya) mengenyam pendidikan yang sama baik formal maupun non formal. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai antara lain: makin menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya partisipasi pendidikan, meningkatnya jumlah tenaga ahli dan profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, tingkat daya saing individu/masyarakat berindikator rata dan kumulatif tingkat pendidikan masyarakat, jumlah produk IPTEK yang dipatenkan dan jumlah industri manufaktur hasil R&D yang diekspor. Karena itu beberapa variabel yang sekian sering diperhatikan dalam bidang pendidikan seperti:
 - a) Partisipasi Pendidikan yakni: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah (APS).
 - b) Hasil Pembangunan Pendidikan yakni: Angka Buta Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.
- 6) Kebudayaan merupakan segala sesuatu, yang manusia mengasuh dan mengembangkan pelbagai potensinya sebagai persona yang bermartabat untuk lebih memanusiawikan kehidupan sosial, baik dalam keluarga maupun seluruh masyarakat negara dengan memajukan adat-istiadat serta pranata-pranata; dan akhirnya mengungkapkan, mengkomunikasikan serta memelihara pengalaman-pengalaman rohani dan aspirasi-aspirasi yang besar sepanjang sejarah dalam karya-karyanya, sehingga bermanfaat bagi kemajuan banyak orang, malah bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian bagi peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan antara lain: tersedianya simbol-simbol budaya yang memaknai kehidupan pemujiannya, terlestariannya pranata-paranata sosial, tersedianya

kebijakan/regulasi pelestarian kebudayaan lokal, jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, berkembangnya kelompok-kelompok kesenian dan sebagainya.

- 7) Politik dan hukum. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera telah memiliki sistem dan kelembagaan politik termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya, yang terepresentasi dalam lembaga legislatif (DPRD). Masyarakat yang sejahtera ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan dan ketertiban sosial yang didukung dengan infrastruktur yang maju. Kesejahteraan bersama suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga supra struktur politik maupun sub ordinasinya, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum yakni rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilihan dengan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, komposisi partai politik dalam pemilihan umum yakni ratio partai politik pemenang pemilu lokal yang memperoleh kursi di DPRD dengan jumlah seluruh partai politik dalam pemilu lokal dan angka kejadian politik praktis seperti massa/demo dalam satu tahun.
- 8) Keamanan dan ketertiban sosial. Kesejahteraan dalam satu kelompok masyarakat ditandai oleh ketentraman dan kedamaian setiap persona dalam memaknai kehidupannya dalam suatu interaksi dan interelasi horizontal. Karena itu, variabel yang menjadi indikator kesejahteraan dari segi keamanan dan ketertiban sosial, antara lain: kecilnya atau tidak adanya angka kriminalitas, demo atau aksi protes sosial, konflik sosial, kasus pelanggaran PERDA, kasus *illegal logging*; tingkat kesadaran hukum masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk; rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk; rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan; dan sebagainya.
- 9) Kualitas pelayanan sosial/publik. Indikator kesejahteraan dari aspek kualitas pelayanan sosial/publik antara lain: berkurangnya jumlah tingkat pengaduan masyarakat, rasio panjang jalan dengan luas wilayah, rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan

umum roda 4 (empat), menurunnya persentase penduduk tanpa akses terhadap sanitasi/pendidikan, adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan terhadap kepentingan masyarakat seperti mengurus KTP, SIM, IMB, SIUP dan sebagainya.

Adil. Secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak);

sepatutnya; sedangkan keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dsb.) yang adil. Berdasarkan arti etimologis ini, terungkap bahwa keadilan merupakan suatu perbuatan atau tindakan dalam kehidupan masyarakat seperti tidak mempraktikkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; tidak diterapkannya standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban sosial; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Indikator keadilan dalam bidang kesehatan diukur berdasarkan antara lain: kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-sumber pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat tanpa memandang status sosial, gender maupun keadaan ekonomi (askeskin/jamkesmas ataupun non-askeskin/jamkesmas). Indikator keadilan dari aspek demografi dan KB tercermin pada antara lain: adanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk memperoleh simbol-simbol identitas diri (akte kelahiran, KTP, dsb.), tidak ada diskriminasi gender dalam ber-KB dan dalam pelayanan Keluarga Berencana dan sebagainya.

Indikator keadilan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain: menggunakan indikator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis; penghargaan dan pengembangan budaya-budaya unik dari setiap suku atau kelompok-kelompok budaya; dan sebagainya.

Indikator keadilan bidang politik dan hukum antara lain: tercermin pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil, kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik.

Dalam bidang keamanan dan ketertiban sosial, keadilan diukur dari kedudukan dan peran serta setiap individu untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial, adanya rasa aman bagi setiap individu dalam mengembangkan jati dirinya, dan sebagainya.

Indikator keadilan secara ekonomis, terwujud antara lain pada adanya kesempatan yang sama bagi semua lapisan sosial masyarakat untuk menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan; adanya hak penghidupan yang layak bagi setiap individu, terutama kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan). Demikian juga bidang ekologis dan penataan ruang, parameter keadilan nyata dalam bentuk antara lain adanya kesempatan yang sama untuk akses pelayanan air minum bersih, memperoleh bantuan-bantuan sosial karena terjadi bencana, mendapat informasi-informasi penataan ruang, kesempatan memperoleh pelayanan penataan ruang seperti IPL, IMB dan sebagainya.

Berkelanjutan.

Secara etimologis, kata dasar dari berkelanjutan yakni lanjut, yang berarti terus, tidak berhenti, masih bersambung. Berkelanjutan mengandung makna berlangsung terus menerus; berkesinambungan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, berkelanjutan mengandung makna bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi kini maupun masa mendatang secara terus menerus. Pembangunan berkelanjutan mencakupi semua aspek kehidupan manusia seutuhnya, tetapi yang lebih bergema dalam pelaksanaan pembangunan ialah pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan dan penataan ruang dan wilayah. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada aspek lingkungan hidup dan penataan ruang dan wilayah berarti proses pembangunan harus dilaksanakan secara proporsional dengan proses pelestarian kualitas dan potensi lingkungan yang di dalamnya termasuk pembaruan terhadap sumber daya alam; tercapainya pemerataan pembangunan antara generasi masa kini dan masa datang; dan pembangunan tidak hanya berorientasi pada sasaran material atau pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga harus mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Tanpa mengabaikan aspek-aspek yang lain, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam uraian ini, lebih difokuskan dan berorientasi pada nuansa ekologis (*environment*) dan penataan ruang.

Proses-proses yang diperagakan dalam pembangunan menunjukkan suatu realita akan adanya suatu interaksi dan interelasi kausalitas yang intensif dan kuat antara

manusia sebagai subjek pembangunan dan lingkungan hidup sebagai area karyanya. Karena itu aktivitas pembangunan harus mampu menciptakan dan memuat suatu tugas dan tanggung jawab (*gabe und aufgabe*) untuk melestarikan **potensi lingkungan hidup** dan penataan ruang wilayah demi keselamatan dan kebahagiaan manusia (*kudut mbong ka'eng golo agu riwok ka'eng beo*) dan meningkatkan kesadaran manusia yang menyatu dengan alam dan kembali ke alam (*back to nature*). Dalam konteks ini, variabel ekologis dan tata ruang diukur berdasarkan pada antara lain : rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, persentasi luas lahan bersertifikat, ketaatan terhadap RTRW, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat pemanfaatan sumber daya alam, cakupan sistem pengelolaan sampah, tingkat rehabilitasi sumber daya alam, ketersediaan *early warning system*, luas lahan kritis, ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dan tata ruang wilayah dan sebagainya.

Dari uraian singkat di atas, tampak bahwa keadilan harus tercermin dan menjadi *factum* pada semua aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat yang adil dalam seluruh aspek kehidupannya mengungkapkan masyarakat yang mengalami kesejahteraan bersama dalam kesehariannya.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai tersebut di atas diaktualisasikan melalui misi-misi pembangunan:

1. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Manggarai melalui:

- a. Pertumbuhan Ekonomi** yakni: Peningkatan daya tarik investasi, penguatan Badan Usaha Milik Daerah; Penguatan daya saing ekspor melalui pembangunan industri berskala kecil dan menengah; Revitalisasi *home industry* dan usaha-usaha kerajinan rakyat; Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Peningkatan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif.
- b. Stabilitas Ekonomi Lokal** yakni: Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal; Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok oleh pemerintah daerah; Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah daerah dengan

perusahaan swasta berskala regional, nasional, internasional dan kedutaan-kedutaan asing; Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM); Peningkatan dukungan IPTEK berbasis masyarakat lokal; Peningkatan Ketahanan Energi, terutama Pembangkit Listrik Panas Bumi Ulumbu dengan memelihara lingkungan alam sekitarnya.

- c. Pengurangan Kemiskinan** yakni: perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat di pedesaan; Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan serta koordinasi penanggulangan kemiskinan; Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan dan pengangguran; Peningkatan penyediaan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal; Peningkatan kualitas jasa *home industry*; Perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya; Peningkatan pembukaan keterisolasian wilayah; Peningkatan dan Perluasan cakupan program/kegiatan berbasis masyarakat pedesaan, Pemberdayaan keluarga dan fakir miskin melalui pelatihan keterampilan usaha; Perluasan dan peningkatan kualitas sumber-sumber pendapatan daerah bidang ekonomi, kebudayaan dan pariwisata.
- d. Sistem Perlindungan Sosial** yakni: Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan kapasitas usaha skala mikro kecil dan menengah bagi keluarga-keluarga miskin melalui penguatan modal dan kelembagaan.
- e. Sarana dan prasarana** yakni: Peningkatan ketersediaan dan keteraksesan sarana dan prasarana yang berkualitas melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan terminal; Peningkatan kuantitas dan kualitas kendaraan; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi udara; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air minum bersih dan sanitasi; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan

pendidikan; dan Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi dan telematika.

2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Manggarai melalui:

- a. Kesehatan** yakni: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; Peningkatan ketersediaan dan mutu obat; Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah pedesaan dan pusat-pusat permukiman penduduk (kampung); Peningkatan kuantitas perekrutan tenaga-tenaga kesehatan; Peningkatan kualitas tenaga-tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan pendidikan formal (tugas atau izin belajar); Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dengan prioritas Jurusan Keperawatan dan Kebidanan; Peningkatan Kerja sama dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Kedokteran) dan Rumah Sakit-Rumah Sakit Nasional untuk memenuhi tenaga-tenaga profesional (spesialis) bidang kesehatan; Peningkatan Pemberian Beasiswa bagi putra/putri daerah yang berprestasi agar bisa kuliah di Fakultas Kedokteran; Pembangunan rumah tunggu (pondok transit) bagi ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi di pusat-pusat fasilitas kesehatan.
- b. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan** yakni: Pemantapan revitalisasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Peningkatan kepemilikan identitas pribadi penduduk; Peningkatan sosialisasi keluarga sejahtera dan Peningkatan pelayanan gratis bagi keluarga miskin yang mengikuti program KB dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Pendidikan** yakni: Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal; Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik; Pembangunan Sekolah Model Standar Internasional dari tingkat Dasar sampai menengah; Peningkatan Penyediaan Regulasi Lokal tentang Kebijakan dan Sistem Bidang Pendidikan; Mendorong Lembaga-Lembaga Pendidikan Swasta (Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan status menjadi universitas mandiri, terutama yang aktual bagi kepentingan masyarakat Manggarai khususnya; Menjadikan Kota Ruteng sebagai Kota Pendidikan.

d. Kebudayaan. Secara umum kebudayaan diarahkan untuk membentuk jati diri pemujanya sebagai persona yang berakhlak mulia, beretika dan bermoral berdasarkan keyakinan budaya dan spirit religiositasnya. Untuk mewujudkan hal ini, antara lain melalui: Pembangunan jati diri dan karakter masyarakat yang berbasiskan pada budaya Manggarai; Peningkatan kerukunan hidup umat beragama; Peningkatan dialog dan diskusi antar umat beragama; menerapkan nilai-nilai luhur budaya Manggarai dalam sistem pendidikan dan tata kerja pemerintahan di Kabupaten Manggarai; dan Peningkatan rasa kebanggaan sebagai orang Manggarai dan sebagainya.

3. Mewujudkan Penataan Birokrasi, Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan dan Ketertiban Sosial Masyarakat Manggarai melalui:

- a. Penataan Birokrasi** yakni: Peningkatan kualitas pelayanan publik; Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem pengawasan dan akuntabilitas; dan Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah.
- b. Pemantapan Hukum** yakni: Pemantapan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi; Pencegahan penyelewengan pemanfaatan dana-dana publik dan peningkatan kualitas penanganan kasus-kasus korupsi; Pembuatan Peraturan Daerah bagi perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender; Peningkatan Partisipasi masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penanganan kasus-kasus pidana dan perdata; Persehatian Batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- c. Pemantapan Politik** yakni: Peningkatan efektifitas fungsi organisasi masyarakat sipil dan partai politik; Pemeliharaan hubungan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga legislatif dan Muspida; Peningkatan integrasi sosial; Peningkatan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa; dan Pelaksanaan transparansi informasi-informasi publik.
- d. Keamanan dan Ketertiban Sosial** yakni: Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; Peningkatan penggalangan keamanan dan ketertiban masyarakat; Penyelesaian konflik-konflik sosial dan pertanahan; Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit sosial seperti perjudian dan komersialisasi seks; dan sebagainya.

4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan ekologis dan berbasis tata ruang di Kabupaten Manggarai melalui: Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan; Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Air Terpadu; Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Kelautan; Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan yang bersih dan hijau; Peningkatan sosialisasi bahwa bumi ini sebagai warisan dan pinjaman dari anak cucu; Peningkatan *resettlement* bagi penduduk yang berdomisili di area hutan; Reboisasi dan penghijauan; Pencegahan dan penindakan terhadap para perambah dan pembabat hutan; Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kecamatan; Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan ruang Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

5. Mewujudkan Kota Ruteng sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan serta Kota Molas (Kota Asri), melalui:

- a) Peningkatan pelayanan pemerintahan menuju pembentukan Kotamadya;
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan (Peningkatan Tipe Rumah Sakit Umum Ruteng menjadi Tipe B;
- c) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Bidang Pendidikan yakni Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan prioritas Jurusan Keperawatan dan Kebidanan, Mendorong dan Memfasilitasi Pembangunan Universitas atau Perluasan/ Penambahan Jurusan pada Perguruan Tinggi yang sudah ada, Menjadikan Kota Ruteng sebagai Kota Jasa Pendidikan/Kota Pendidikan);
- d) Peningkatan Perluasan Pembangunan Sarana Perdagangan dan Industri; dan
- e) Peningkatan Kota Ruteng sebagai Kota Molas (Kota Asri) berdasarkan filosofi yakni kesempurnaan budi dan lingkungan, melalui (i) pembangunan taman kota dengan tanaman hias dan kayu pelindung species lokal seperti kayu Manis (Ndingar), Munting Rona (untuk dataran tinggi), kayu Labe Hang, dan sebagainya berdasarkan blok wilayah; (ii) Pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk pusat-pusat pembangunan; (iii) Revitalisasi kampung-kampung tradisional agar tetap ada sebagai pusat budaya; dan (iv) tersedianya taman kota, kawasan hijau dan alun-alun kota.